

BAB III ANALISIS GEDUNG DPRD KULON PROGO

A. ANALISIS FUNGSIONAL BANGUNAN

3.1 Analisa Lokasi

3.1.1 Penentuan Lokasi Site

Pemilihan site bangunan Gedung DPRD Kulon Progo disesuaikan dengan fungsi bangunan sebagai bangunan perkantoran yang terbuka bagi masyarakat dan memenuhi fungsi pengawasan bagi pemerintah Eksekutif Daerah, yaitu :

1. Terletak pada Kota Administrasi Kabupaten Kulon Progo yaitu kecamatan Wates.
2. Sesuai dengan rencana peruntukan lahan (tata guna lahan) bagi pengembangan bidang perkantoran yang sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota Wates Kabupaten Kulon Progo.
3. Tersedia dan dapat dijangkau oleh jaringan utilitas seperti air bersih, jaringan listrik, jaringan telephon, jaringan sanitasi kota serta sarana pendukung lainnya.
4. Luas site mencukupi untuk menampung berbagai kebutuhan ruang yang dapat mewadahi berbagai aktifitas pada Gedung DPRD Kulon Progo.
5. Kondisi sekitar mampu mendukung fungsi dan tujuan bangunan.
6. Mempunyai kejelasan visual (mudah dilihat), misalnya terletak pada tapak yang terbuka sehingga mudah dilihat dan memiliki akses yang mudah.

Berdasarkan pertimbangan diatas maka, pemilihan site bangunan Gedung DPRD Kulon Progo disesuaikan dengan karakter dari lokasi yang mempunyai potensi sebagai lingkungan perkantoran yang dekat dan terbuka bagi masyarakat dan sekaligus dapat menunjang kewajiban DPRD sebagai pengontrol jalannya pemerintahan.

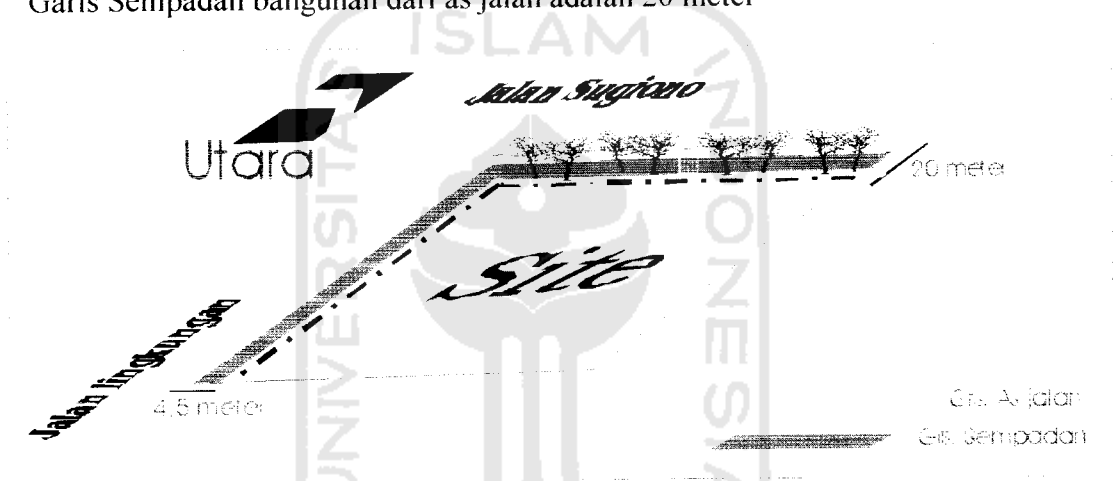
Site tepatnya terletak pada jalan Sugiono \pm 500m dari kantor Kepala Daerah Tingkat II Kulon Progo dan \pm 200 m dari lingkungan perumahan penduduk, dengan luas site \pm 15 000 m²

3.1.2 Potensi Site

Kawasan sekitar jalan Sugiono merupakan lokasi perkantoran Pemerintah Daerah Tingkat II Kulon Progo yang dalam Rencana Tata Ruang Kota Wates merupakan daerah rencana pengembangan Perkantoran Administrasi Daerah, SMTP dan pertanian.

Adapun peraturan pemerintah mengenai pembangunan site meliputi :

1. Prosentase maksimum Koefisien Dasar Bangunan (KDB) untuk bangunan yang akan didirikan tidak boleh lebih dari 40 % dengan batas ketinggian bangunan 12m atau maksimal 2 lantai.
2. Garis Sempadan bangunan dari as jalan adalah 20 meter



Gbr. 3.1 Site Bangunan Gedung DPRD Kulon Progo

Batas site sebelah utara merupakan jalan Sugiono (arteri skunder), sebelah selatan daerah persawahan, sebelah barat jalan lingkungan dan sebelah timur daerah persawahan.

Site merupakan area persawahan yang secara garis besar kondisi site sebagai berikut :

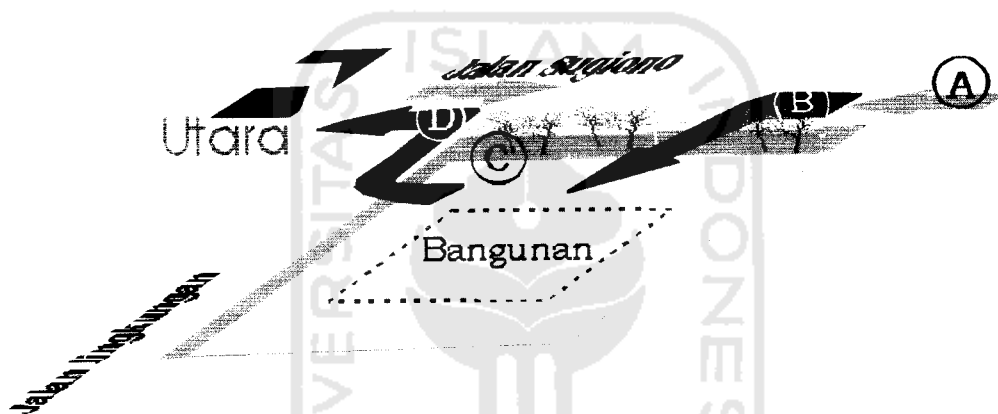
- a. Site relatif tidak berkontur
- b. Site memiliki jaringan utilitas seperti jaringan listrik, jaringan komunikasi, jaringan air bersih dan jaringan drainase kota.
- c. Site memiliki kedekatan dengan daerah perkantoran Pemda Kulon Progo, perumahan penduduk dan sekolah (sarana pendidikan)

3.1.3 Analisis Site

3.1.3.1 Sirkulasi Site

A. Pencapaian

Posisi site terletak pada jalan Sugiono dimana lalu lintas padat pada jam-jam 7.00-9.00, 12.00-14.00 dan 16.00-18.00 sehingga perlu diperhatikan pencapaian dengan meletakkan posisi pintu masuk untuk kemudahan sirkulasi menuju bangunan dengan tidak mengganggu lalu lintas kota dan perlunya area parkir dalam site untuk menghindari penggunaan parkir disepanjang jalan tersebut.



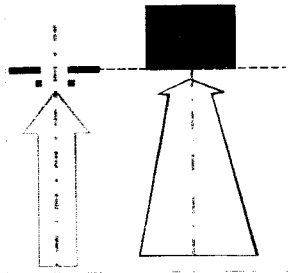
Gbr. 3.2 Sirkulasi Luar Site

- A. Jalan Sugiono merupakan sirkulasi utama yang padat lalu lintas, untuk menghindari adanya kemacetan lalu lintas dijalur tersebut maka daerah sepanjang site dijadikan daerah bebas parkir dengan konsekwensi penyediaan area parkir didalam site.
- B. Area B merupakan daerah garis sempadan (bebas bangunan) yang cukup luas, untuk memberikan fungsi pada lahan tersebut dapat direncanakan sebagai lahan parkir dan taman.
- C. Sebagai respon pada kepadatan lalu lintas, pencapaian arah masuk dan keluar site disearahkan dengan arah gerak lalu lintas.

D. Jalan Lingkungan yang tidak padat diefektifkan sebagai pencapaian bagi karyawan dan staff Gedung DPRD, hal ini dapat membantu pada respon antisipasi kemacetan diarah jalur jalan Sugiono.

Adapun pencapaian sendiri dapat diterapkan dengan beberapa alternatif antara lain :

1. Pencapaian secara langsung 2. Pencapaian secara tersamar 3. Pencapaian secara berputar

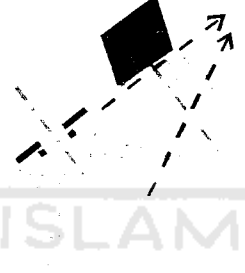


Keuntungan :

- a. Pencapaian ke pintu masuk jelas
- b. Vasade bangunan keseluruhan terlihat jelas

Kekurangan :

- a. Bentuk tiga dimensi dan perspektif bangunan tidak terlihat

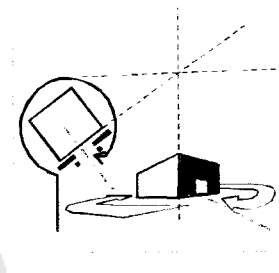


Keuntungan :

- a. Memberi efek perspektif pada fasade depan

Kekurangan :

- a. Memerlukan tanda utk mengarah ke tujuan
- b. Pencapaian kurang jelas



Keuntungan :

- a. Dapat memperlihatkan keutuhan bangunan tiga dimensi
- b. Memberi surprise

Kekurangan :

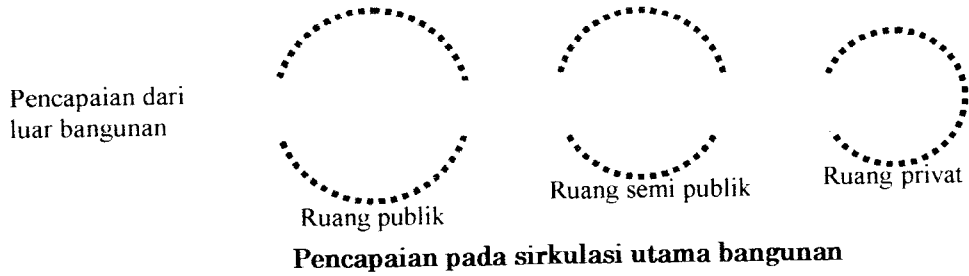
- a. Pencapaian tidak jelas
- b. Memerlukan banyak tanda untuk mengarah ke tujuan

Gbr. 3.3 Alternatif Pencapaian

Dengan analisa diatas maka rencana pencapaian dan sirkulasi pada site Gedung DPRD Kulon Progo menggunakan peencapaian secara langsung dengan pertimbangan :

1. Memberi kemudahan dalam pencapaian pada aktifitas publik seperti demonstrasi.
2. Memberi kesan menerima dengan konsekwensi pada kemudahan pencapaian ke dalam bangunan sehingga berkesan terbuka dalam menerima masyarakat umum.

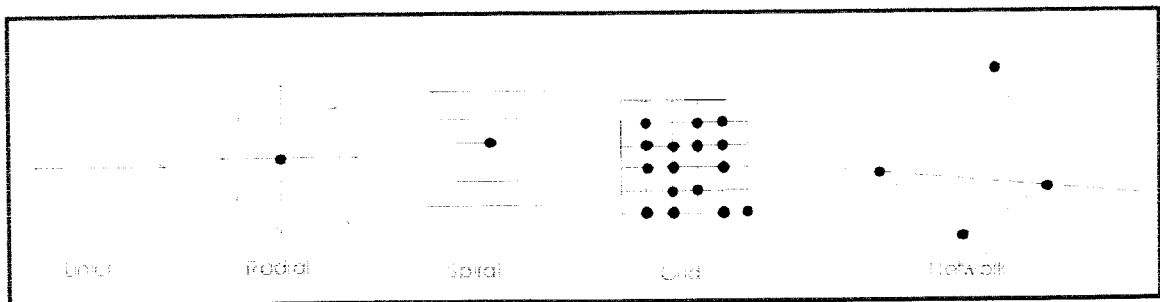
Pada pencapaian ini hubungan kegiatan dicapai dari luar site menuju ruang publik, semi publik, privat secara langsung melalui sirkulasi utama.



gbr. 3.4 Arah Pencapaian

B. Sirkulasi Dalam pada Site

Sirkulasi dalam pada site adalah sirkulasi dimana masa masa pada bangunan dihubungkan oleh garis-garis pencapaian dan pada unit-unit masa tersebut juga dihubungkan oleh sirkulasi antar ruang. Adapun jenis sirkulasi antara lain :

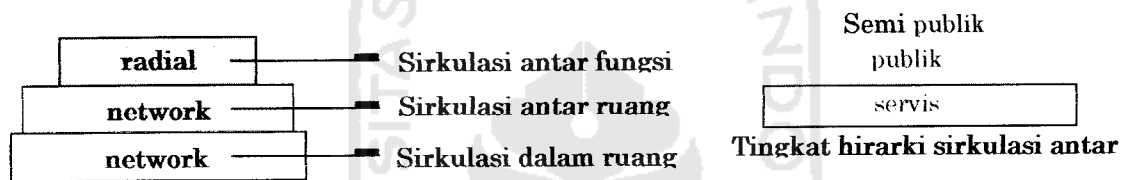


Gbr. 3.5 Pola Sirkulasi

Dari alternatif diatas maka jenis sirkulasi yang sesuai dengan Gedung DPRD Kulon Progo adalah gabungan jenis sirkulasi network dan radial dengan pertimbangan :

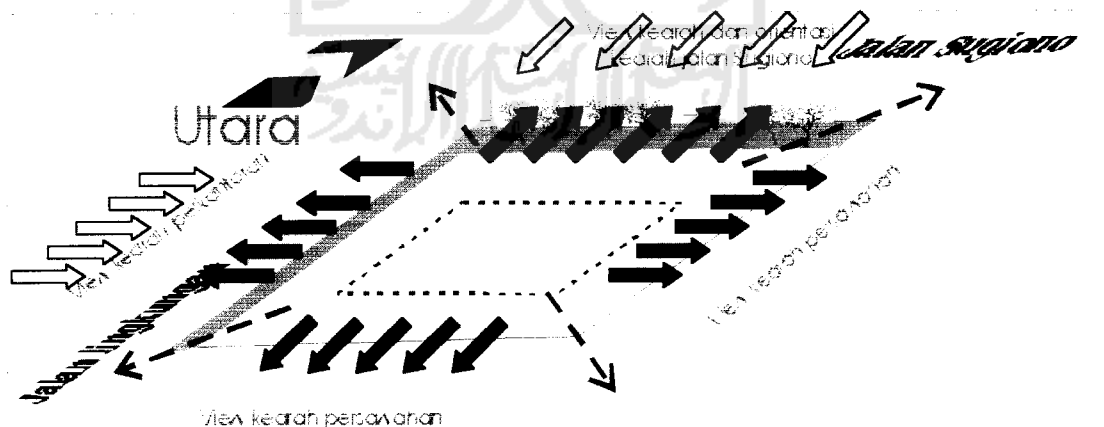
1. Kesesuaian dengan pola keruangan yang menggunakan hirarki/ berpusat disesuaikan dengan sirkulasi radial
2. Hubungan kelompok ruang yang saling berhubungan membentuk suatu sistem disesuaikan dengan sirkulasi network

Pada alternatif ini sirkulasi network berfungsi untuk menghubungkan antar ruang dalam satu fungsi yang mengarah pada sirkulasi utama bangunan yang menghubungkan antar fungsi dengan sifat radial menuju titik hirarki tertinggi.



3.1.3.2 View dari dalam atau luar Site

Site menempati lokasi yang memiliki view masuk dan keluar dengan spesifikasi sebagai berikut :



Gbr. 3.6 Arah View Bangunan

- a. Site bagian utara mendapat view dari jalan Sugiono, berseberangan dengan kantor dinas Pekerjaan Umum (DPU).
- b. Site bagian selatan view mengarah keluar pada area persawahan yang pada RDTRK Wates merupakan area pengembangan sarana pendidikan (SMTP).
- c. Site sebelah Timur view mengarah keluar pada area persawahan yang merupakan daerah rencana pengembangan perkantoran.
- d. Site pada bagian barat mendapat view dari jalan lingkungan yang berseberangan dengan area perkantoran.

Pada bangunan Gedung DPRD Kulon Progo, orientasi fasade bangunan ditujukan ke jalan Sugiono dengan arah ke depan dan menyudut serta kearah barat hal tersebut disesuaikan dengan kondisi site yang banyak menerima view dari luar, sedangkan arah view keluar diarahkan keseluruh sudut bangunan karena untuk memaksimalkan bukaan sebagai alur keluar-masuk udara dan penerangan alami serta mendukung adanya kesan keterbukaan.



Arah view masuk diterapkan pada ruang publik dan semi publik dimaksudkan untuk memberikan kemudahan pada pengunjung untuk menemukan ruang tersebut sehingga perletakkannya berada dibagian utara dan barat site yang banyak mendapat view dari luar.

View keluar diterapkan pada semua ruang dengan arah barat dan utara untuk ruang publik dan semi publik, sedangkan arah timur dan selatan diterapkan untuk ruang privat dan servis.



3.2 Fungsi dan Kebutuhan Ruang

3.2.1 Analisa Kegiatan Pelaku

Kegiatan yang diwadahi dalam bangunan Gedung DPRD Kulon Progo meliputi beberapa kegiatan yaitu kegiatan yang bersifat publik, semi publik, privat dan kegiatan servis yang dikelompokkan dalam dua badan tugas antara lain kelompok anggota DPRD dan kelompok staff Sekretariat DPRD, kegiatan tersebut antara lain :

Tabel 3.1 Kegiatan dan Kebutuhan Ruang

Kegiatan	Fungsi ruang	pelaku	Jumlah	Keb. ruang	Fasilitas
Demonstrasi	Publik	Masyarakat-Pers	200	R. Hall	Panggung Orasi
		Anggota DPRD	40	R. Pengamatan	
		Petugas	20	Lavatori	
Sidang Paripurna	Publik	Masyarakat-Pers	150	R. Sidang Paripurna	Mimbar Pimpinan
		Anggota DPRD	40	R. Pengelola	Sound Sistem
		Petugas	10	R. Pengunjung	Meja-Kursi Persid
		Ang. Eksekutif	20	R. Pers	Kursi Pengunjung
Parkir	Publik	Tamu (masy,	120 mbl	Parkir mobil	Rambu-Rambu
		pers, Eks)	100 mtr	Parkir Motor	Garis Batas Kend.
		Anggota DPRD	3 bis	Parkir Bis	Pos Jaga
		Sekretariat		Lavatori	
Istirahat/ Santai	Publik	Umum		Taman	Tempat duduk
				Mushola	Tempat Bermain
				Cafeteria	Lapangan O.R
				Perpustakaan	
				Lapangan O. R	
Peny. Pendapat	Publik	Masyarakat	40	R. Peny. Pendapat	Meja-kursi
		Anggota DPRD	8	Lavatori	
		Petugas	2		
Penerimaan	Publik	Masyarakat-pers	150	Lobby	Meja Penerimaan
		Petugas		R. Informasi	Alat Komunikasi
				R. Tunggu	Kursi Tunggu
Sidang	Semi Publik	Anggota DPRD	10	R. Sidang Fraksi	Meja Sidang
		Petugas	2	R. Sidang Komisi	Sound Sistem

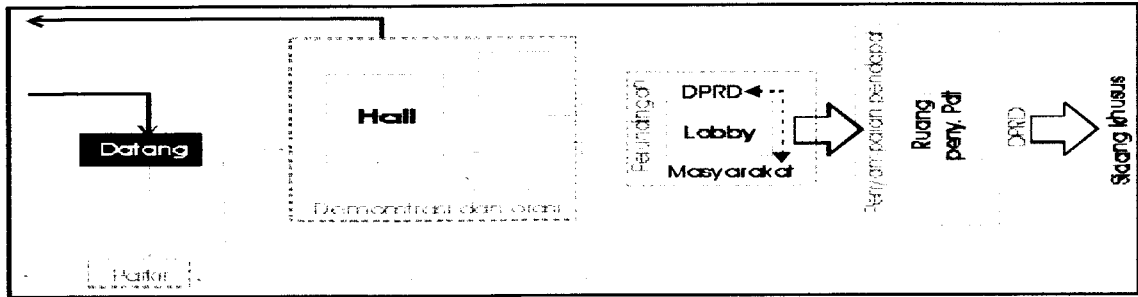
				R. Rapat Risalah	
				Lavatori	
Pelayanan	Semi Publik	Petugas	2	R. Tamu	Meja-kursi
		Tamu	5	R. Pers	
Kunjungan Kerja	Semi Publik	Anggota DPRD	10	R. Transit	
		Petugas	2	Garasi	
				R. Tunggu Sopir	
Rutinitas Kerja	Prifat	Anggota DPRD	40	R. Ketua DPRD	Meja-kursi
		Sekretariat	40	R. Wakil ketua	Lemari arsip
		(staff, karyawan)		R. Komisi	
				R. Fraksi	
				R. Arsip	
				R. Sekretaris	
				R. Kepala Bagian	
				R. Ka. Sub. Bag	
				R. Karyawan	
				R. Staff	
				KM/WC	
				Lavatori	

Analisa Ruang pada Kegiatan Utama

1. Demonstrasi

Demonstrasi adalah kegiatan pelayanan pihak DPRD kepada masyarakat umum dalam menerima pernyataan protes ataupun usulan terhadap jalannya Pemerintahan Daerah, kegiatan ini bersifat umum dengan waktu kegiatan tidak terbatas. Adapun kebutuhan ruang yang harus disediakan adalah :

- a. Hall
- b. Panggung Orasi
- c. Ruang Pengamatan
- d. Lavatori



Gbr. 3.7 Bagan Kegiatan Demonstrasi

Pada ruang utama kegiatan demonstrasi dapat diterapkan dengan sifat ruang yang terbuka ataupun tertutup yang mewadahi kebutuhan ruang-ruang dan fasilitas kegiatan tersebut, dalam hal ini ada dua alternatif ruang :

a. Hall Terbuka

Keuntungan :

- Kapasitas ruang lebih fleksibel
- Memberi kesempatan peran serta pada masyarakat sekitar
- Jaminan pada keamanan gedung

Kekurangan :

- Kurangnya kenyamanan pada ruang
- Kurangnya interaksi antara masyarakat dan DPRD

b. Hall Tertutup

Keuntungan :

- Memiliki kenyamanan ruang yang lebih
- Interaksi antara masyarakat dengan DPRD

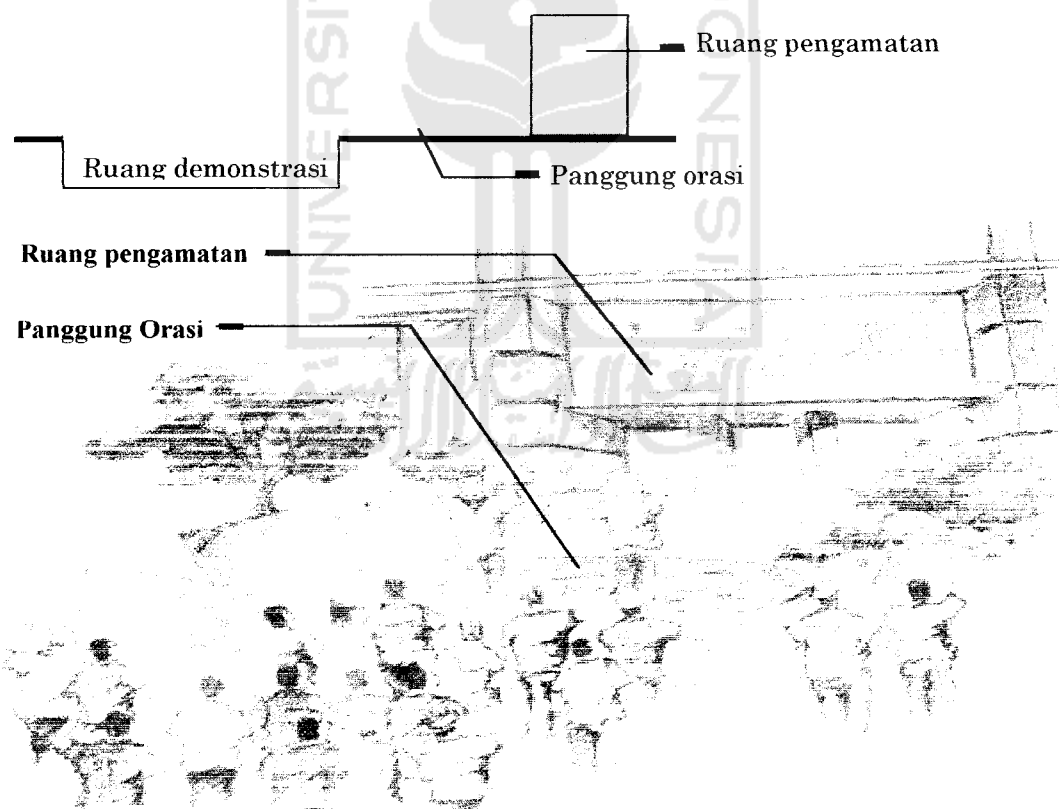
Kekurangan :

- Kapasitas ruang terbatas
- Keamanan Gedung kurang terjamin

Dari alternatif ruang diatas, maka ruang Hall terbuka akan lebih menguntungkan dengan penerapan atau letak ruang pada bagian depan bangunan, adapun pertimbangannya adalah :

- Kemudahan pencapaian pada saat kegiatan berlangsung
- Keamanan gedung lebih terjamin
- Ruang terbuka lebih fleksibel dalam menerima kelebihan pengguna
- Lebih berkesan terbuka karena memberikan kesempatan bagi masyarakat umum untuk menyaksikan atau berperan dalam kegiatan tersebut.
- Letak ruang pengamatan yang lebih tinggi dengan ruang lainnya akan memberi kesan wibawa pada pemakainya, selain itu juga memberi jaminan pada keamanan.

Hall diletakkan didepan bangunan untuk memudahkan pencapaian dengan ruang demonstrasi diperendah dari permukaan site untuk mempermudah pengamatan.



Gbr. 3.8 Hall dengan ruang terbuka

2. Sidang Paripurna

Adalah sidang Dewan Legislatif yang diadakan dalam pembentukan RAPBD, penetapan peraturan daerah (Perda), pertanggung jawaban Bupati, sidang pengajuan proyek daerah (sidang umum), sidang pemecahan kasus daerah (sidang khusus) dan sebagainya. Ruang yang dibutuhkan pada kegiatan ini adalah :

- a. Ruang Sidang
- b. Ruang Pengelola (ruang mixer)
- c. Ruang Pengunjung dan Pers
- d. Mimbar Pimpinan.
- e. Lavatori

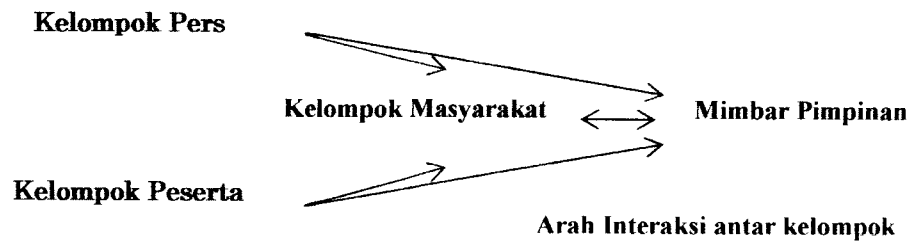


Gbr. 3.9 Bagan Kegiatan Sidang Paripurna

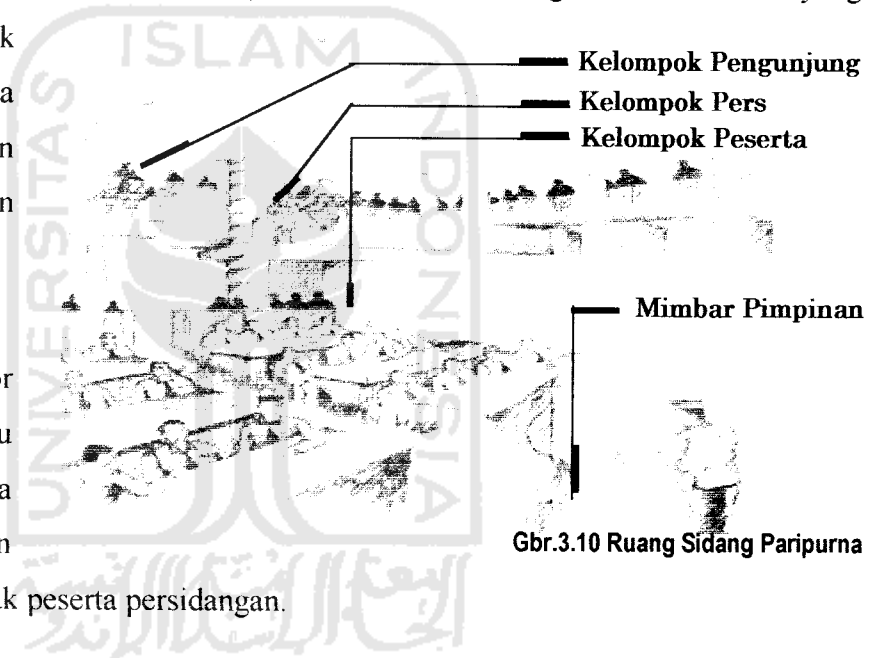
Kebutuhan ruang diatas dalam perancangan Gedung DPRD Kulon Progo dapat diterapkan dengan 2 alternatif yaitu penempatan secara terpisah dan penggabungan.

1. Penggabungan ruang
2. Pengelompokan ruang

Dari analisa diatas maka penempatan ruang yang sesuai dengan ruang sidang paripurna Gedung DPRD Kulon Progo adalah menggunakan cara pengelompokan dengan pertimbangan :



- Pertimbangan pada faktor keamanan baik pihak DPRD, masyarakat, atau kelompok peserta persidangan lainnya, yaitu memberikan jarak pada kelompok tersebut untuk menghindari perselisihan pendapat pada persidangan.
- Pertimbangan pada faktor fungsi yaitu membedakan tugas dan aktifitas yang berbeda dari pihak peserta persidangan agar persidangan dapat berjalan dengan baik.
- Pertimbangan pada faktor ekspresi yaitu menekankan pada terciptanya kesan wibawa pada pihak peserta persidangan.



Gbr.3.10 Ruang Sidang Paripurna

3. Persidangan

Persidangan adalah kegiatan utama dari tugas anggota dewan legislatif sebagai penentu jalannya pemerintahan daerah, adapun persidangan dibagi menjadi tiga jenis yaitu :

1. Sidang Komisi
2. Sidang Fraksi
3. Sidang Risalah

Dalam rencana ruang sidang Gedung DPRD Kulon Progo dapat diterapkan dengan susunan secara kluster (berkelompok) dan secara hirarki (berpusat) dengan alternatif ruang sebagai berikut :

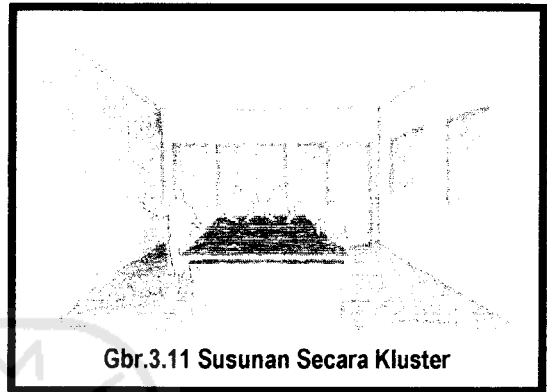
a. Susunan ruang sidang secara kluster

Kelebihan :

- Interaksi antar pemakai mudah
- Tidak membutuhkan ruang yang besar

Kekurangan :

- Jumlah pemakai terbatas



Gbr.3.11 Susunan Secara Kluster

b. Susunan ruang sidang secara hirarki

Kelebihan :

- Daya tampung optimal

Kekurangan :

- Ruang gerak terbatas
- Membutuhkan ruang yang besar

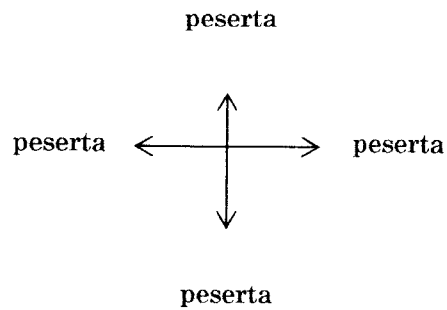


Gbr.3.12 Susunan Secara Hirarki

Dari analisa diatas maka susunan ruang yang tepat dari kedua alternatif untuk ruang sidang Gedung DPRD Kulon Progo adalah secara kluster dengan pertimbangan :

- Pertimbangan pada fungsi secara kualitatif, yaitu mengoptimalkan interaksi antara peserta sidang dengan meminimalkan jarak antar peserta.
- Pertimbangan pada fungsi secara kuantitas, yaitu mengoptimalkan besaran ruang disesuaikan dengan jumlah peserta sidang yang terbatas.

Kelompok kluster yang dimaksud dalam perencanaan Gedung DPRD ini adalah kluster tanpa hirarki atau pengelompokan yang disejajarkan antara peserta satu dengan lainnya, hal ini dicapai untuk mempermudah interaksi antar peserta sidang.



Dengan kesejajaran maka interaksi antar peserta persidangan akan lebih mudah dan hubungan antar peserta akan lebih optimal antara satu dengan lainnya

Hubungan dan interaksi peserta sidang



Gbr. 3.13 Ruang Sidang secara Kluster (berkelompok)

3.2.2 Analisa Kebutuhan dan Besaran Ruang

Besaran ruang pada Gedung DPRD Kulon Progo ditentukan oleh beberapa faktor yaitu :

1. Kegiatan yang diwadahi - Bab II
2. Jumlah pemakai (prosentase) – Bab III
3. standart besaran ruang – Bab II

Berdasarkan pada pendataan jumlah anggota Legislatif, pegawai dan karyawan Gedung DPRD Kulon Progo terdiri dari 40 orang anggota Legislatif serta 40 pegawai dan karyawan sekretariat DPRD.

Berdasarkan tuntutan akan penambahan ruang baru yang bersifat publik dengan melibatkan peran unsur masyarakat diasumsikan secara maksimum mewadahi 200 orang

Tabel besaran ruang pada bangunan Gedung DPRD Kulon Progo

1. Kebutuhan Ruang Publik

Tabel 3.2 Ruang Publik Anggota Dewan Legislatif

No	Kebutuhan ruang	Unit	Asumsi perhitungan	Luas (m ²)	Analisis	Jumlah (m ²)
1	R. Sidang Paripurna	1	150 masy, 40 angg Leg, 10 petugas, 20% Sirkulasi, 5% lain-lain	1,25 0,8	((150+(20% \times 150)) \times 1,25 + (40 + 10) \times 0,8	312,5
2	Lobby	1	75% masy,20% sirkulasi	1,1	((75% \times 200) + (20% \times 200)) \times 1,1	209
3	R. Hall	1	100% masy, 100% angg Leg, 50% petugas, 20% Sirkulasi , 5% lain-lain	1,5	((200 + 40 + 20) + (20% + 260) + (5% + 260)) \times 1,1	487,5
4	Parkir Publik	1				1360,8
	Mobil		60 mbl (30% masy)	12	((60 \times 12) +	
	Motor		150 mtr	1,5	(150 \times 1,5) +	
	Bis		3 bis	44	(3 \times 44)+20%jml	
5	R. Peny. Pendapat	1	20% masy,20% angg. Leg 5% petugas	2,5	((40 + 8 + 2)) \times 2,5	125
6	Taman	1	menyesuaikan	-	-	-
Jumlah Total						2494,8

Tabel 3.3 Ruang Publik Sekretaris DPRD

No	Kebutuhan ruang	Unit	Asumsi perhitungan	Luas (m ²)	Analisis	Jumlah (m ²)
1	Parkir Pengguna	1				720
	Mobil		40 mbl (50% pengguna)	12	((40 \times 12) +	
	Motor		80 mtr (100% pengguna)	1,5	(80 \times 0,8)+20%jml	
2	Taman	1	Menyesuaikan			
Jumlah Total						720

2. Kebutuhan Ruang Semi Publik

Tabel 3.4 Ruang Semi Publik Anggota Legislatif

<i>no</i>	<i>Kebutuhan ruang</i>	<i>Unit</i>	<i>Asumsi perhitungan</i>	<i>Luas (m²)</i>	<i>Analisis</i>	<i>Jumlah (m²)</i>
1	R. Sidang Komisi	2	25% Angg Leg. 5% pet.	3	$((25\% \times 40) + (5\% \times 40)) \times 2 \times 3$	72
2	R. Sidang Fraksi	2	25% angg. Leg. 5% pet.	3	$((25\% \times 40) + (5\% \times 40)) \times 2 \times 3$	72
3	R. Tamu	2	5 orang	2,5	$5 \times 2 \times 2,5$	25
4	R. Pers	3	5 orang	2,5	$5 \times 3 \times 2,5$	37,5
5	R. Transit	1	25% angg. Leg. 5% pet	3	$((25\% \times 40) + (5\% \times 40)) \times 3$	36
Jumlah Total						242,5

Tabel 3.5 Ruang Semi Publik Sekretariat DPRD

<i>no</i>	<i>Kebutuhan ruang</i>	<i>Unit</i>	<i>Asumsi perhitungan</i>	<i>Luas (m²)</i>	<i>Analisis</i>	<i>Jumlah (m²)</i>
1	R. Rapat Risalah	1	25% sekretariat, 10% angg Legislatif	3	$((25\% \times 40) + (10\% \times 40)) \times 3$	42
2	R. Tamu	2	5 orang	2,5	$5 \times 2 \times 2,5$	25
3	Garasi	5	5 kendaraan	12	12×5	60
Jumlah Total						127

3. Kebutuhan Ruang Privat

Tabel 3.6 Ruang Privat Anggota Legislatif

<i>no</i>	<i>Kebutuhan ruang</i>	<i>Unit</i>	<i>Asumsi perhitungan</i>	<i>Luas (m²)</i>	<i>Analisis</i>	<i>Jumlah (m²)</i>
1	R. Ketua Dewan	1	1 Orang	30	1×30	30
2	R. Wakil Ketua	3	1 Orang	20	3×20	60
3	R. Komisi	5	7 Orang	8	$5 \times 7 \times 5$	280
4	R. Fraksi	7	5 Orang	8	$7 \times 5 \times 5$	280

5	R. Arsip	1	1 Orang	16	1 x 16	16
Jumlah Total						666

Tabel 3.7 Ruang Privat Sekretariat DPRD

no	Kebutuhan ruang	Unit	Asumsi perhitungan	Luas (m ²)	Analisis	Jumlah (m ²)
1	R. Sekretaris	1	1 Orang	25	1 x 25	25
2	R. Kepala Bagian	3	1 Orang	15	3 x 15	45
3	R. Kepala. Sub. Bag	6	1 Orang	12	6 x 12	72
4	R. Karyawan	3	4 Orang	6	3 x 4 x 6	72
5	R. Risalah	1	2 Orang	8	2 x 8	16
6	R. Staff	6	5 Orang	6	6 x 5 x 6	180
Jumlah Total						410

4. Kebutuhan Ruang Servis

Tabel 3.8 Ruang Servis Anggota Legislatif

no	Kebutuhan ruang	Unit	Asumsi perhitungan	Luas (m ²)	Analisis	Jumlah (m ²)
1	Lavatory	5	5 Orang	3	5 x 5 x 3	75
2	KM/WC	4	1 Orang	6	4 x 6	24
4	Lapangan O. R	1	-			
5	Mushola	1	100 orang	0,65	100 x 0,65	65
Jumlah Total						164

Tabel 3.9 Ruang Servis Sekretariat DPRD

No	Kebutuhan ruang	Unit	Asumsi perhitungan	Luas (m ²)	Analisis	Jumlah (m ²)
1	Lavatory	4	3 Orang	3	4 x 3 x 3	36
2	Mushola	1	100 orang	0,65	100 x 0,65	65
3	Lapangan O. R	1	-			

4	KM/WC	1	1 Orang	6	1 x 1 x 6	6
5	Perpustakaan	1	3 petugas,	3	(3 x 3) +	79
	Perbukuan		50 Pengguna	0,6	(50 x 0,6) +	
	R. Baca			0,8	(50 x 2,5)	
6	Cafetaria	1	100 pengguna	1,4	(25%x40)x2x1,4	140
7	Dapur	1	3 Orang	8	3 x 8	24
Jumlah Total						350

Luas total keseluruhan $\pm 5174,3 \text{ m}^2$, untuk menganalisa ruang sirkulasi diambil 20% dari luas keseluruhan, jadi $1034,86 + 5174,5 = 6209,36$. Maka luas keseluruhan bangunan adalah $\pm 6209,36 \text{ m}^2$

3.2.3 Hubungan Ruang dan Organisasi Ruang

3.2.3.1 Hubungan Ruang

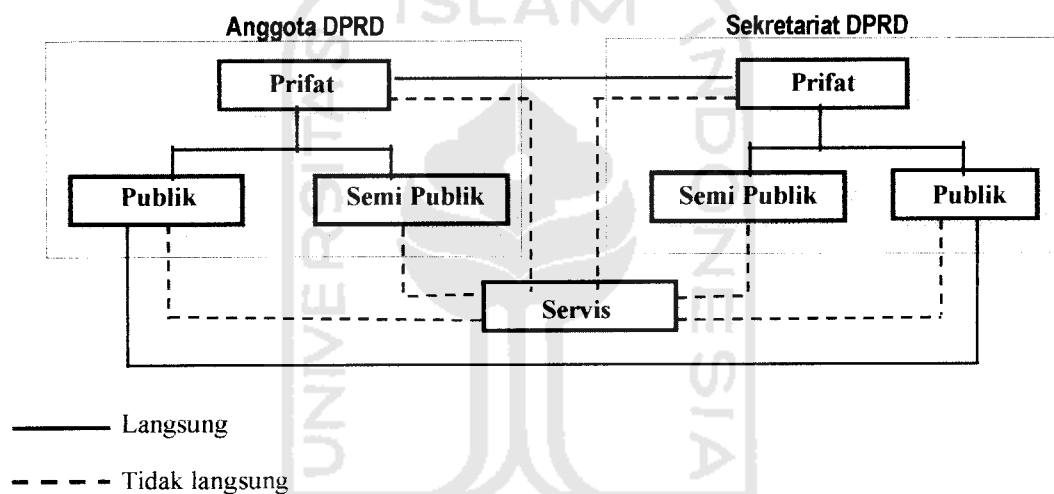
Hubungan ruang dalam bangunan Gedung DPRD Kulon Progo merupakan keterkaitan antara ruang satu dengan lainnya. Dasar-dasar pertimbangan dalam menentukan hubungan ruang antara lain :

- a. Keterkaitan hubungan antar kegiatan
- b. Keterkaitan antar fungsi kegiatan, serta frekwensi hubungan kerja.

Dari dasar pertimbangan diatas didapat tiga tingkatan hubungan ruang yaitu :

1. Hubungan Langsung/ Hubungan Erat (kegiatan dengan tingkat privasi rendah) yaitu :
 - a. Lobby berhubungan langsung dengan Ruang Sidang Paripurna, Ruang Penyampaian Pendapat, Ruang Tamu dan Ruang Pers.
 - b. Ruang Ketua berhubungan langsung dengan Ruang Sekretaris.
 - c. Ruang Ketua berhubungan langsung dengan Ruang Wakil Ketua.
 - d. Ruang Sekretaris berhubungan langsung dengan Ruang Kepala Bagian.
 - e. Ruang Sidang Paripurna berhubungan langsung dengan ruang teknis.

2. Hubungan Tidak Langsung/ Hubungan Kurang Erat (tingkat privasi sedang)
 - a. Ruang Pengelola berhubungan tidak langsung dengan ruang-ruang lain
 - b. Ruang Staff dan Karyawan berhubungan tidak langsung dengan Ruang Anggota Dewan Legislatif.
 - c. Lavatori berhubungan tidak langsung dengan ruang-ruang lainnya.
 - d. Hall berhubungan tidak langsung dengan ruang-ruang lainnya.
3. Tidak ada Hubungan (tingkat privasi tinggi)
Yaitu ruang-ruang kegiatan servis tidak berhubungan dengan ruang-ruang lainnya.



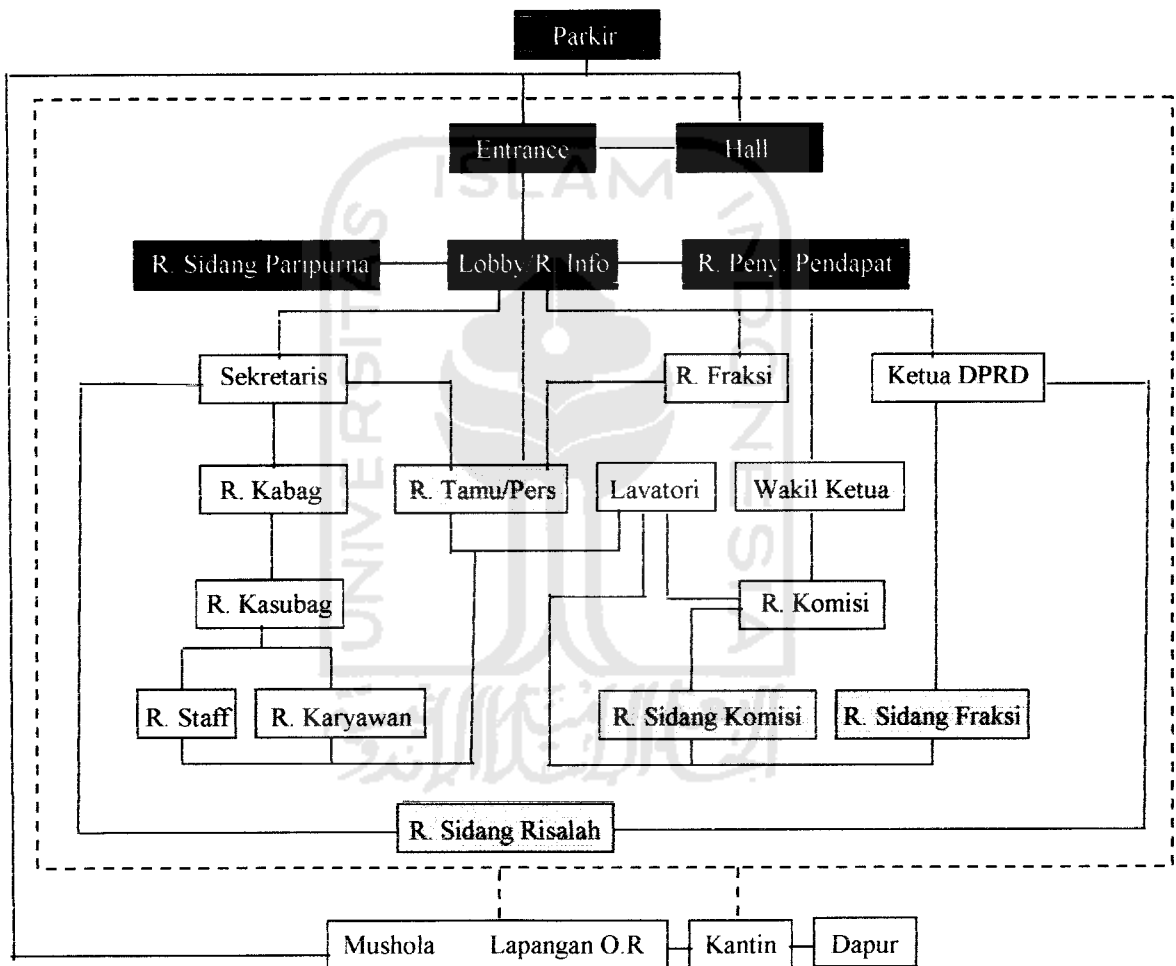
Gbr 3.14 Bagan Hubungan Ruang

3.2.3.2 Organisasi Ruang

Organisasi ruang dilakukan untuk memperoleh penataan ruang yang optimal. Dasar penataan ruang dalam menentukan organisasi ruang adalah :

- a. Hirarki atau tingkatan fungsi ruang
- b. Hubungan antar ruang
- c. Frekwensi hubungan ruang

Dari dasar pertimbangan diatas maka organisasi dalam Gedung DPRD Kulon Progo adalah organisasi tata ruang, yaitu pengelompokan ruang-ruang pada wadah aktifitas anggota Dewan Legislatif dan Sekretariat Gedung DPRD yang berhubungan secara per-kelompok dengan ikatan ruang yang dibagi dalam ruang kegiatan Publik, Semi Publik, Privat dan Servis.



Gbr. 3.15 Bagan Organisasi Ruang

B. ANALISIS CITRA DAN KESAN BANGUNAN

3.3 Analisa Kesan Keterbukaan dan Kewibawaan serta Kontektual pada Bangunan Tradisional

Analisa kesan Keterbukaan dan Kewibawaan serta kontektual pada bangunan tradisional dibawah adalah metode yang dilakukan dengan menerapkan citra/ kesan pada fungsi dan dasar-dasar faktor penentu dengan pendekatan penerapan citra pada unsur-unsur dasar perancangan bangunan yang dapat disesuaikan.

Adapun hubungan kesesuaian antara dasar-dasar perancangan dengan faktor penentu ekspresi bangunan adalah sebagai berikut :

3.3.1 Analisa Kesan Keterbukaan

Tabel 3.10 Dasar Penentu Kesan Terbuka

Faktor penentu	Tata masa	Lay out ruang	Bentuk bangunan	Sirkulasi
Komposisi				
Hirarki				
Skala				

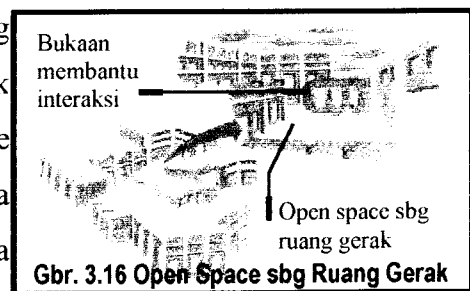
Keterangan :

- : berhubungan
- : tidak berhubungan

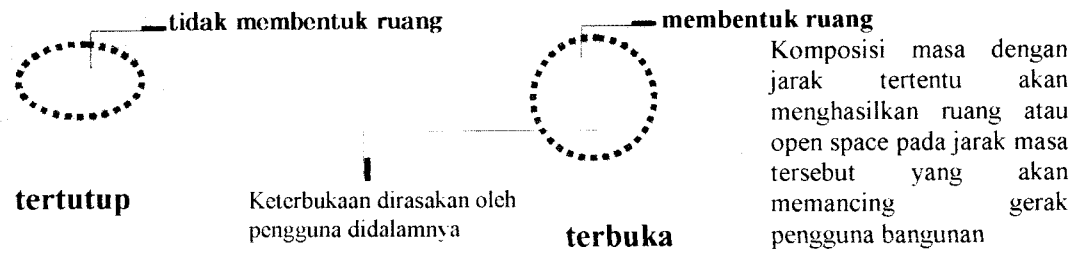
Dalam menentukan kesan keterbukaan pada bangunan Gedung DPRD Kulon Progo dapat dicapai melalui :

1. Komposisi

Komposisi diciptakan melalui tata masa yang diarahakan dengan memadu gubahan masa untuk membentuk ruang-ruang sirkulasi atau open space yang mengarah pada aktifitas gerak pengguna sehingga memberi kesan terbuka. Selain itu juga



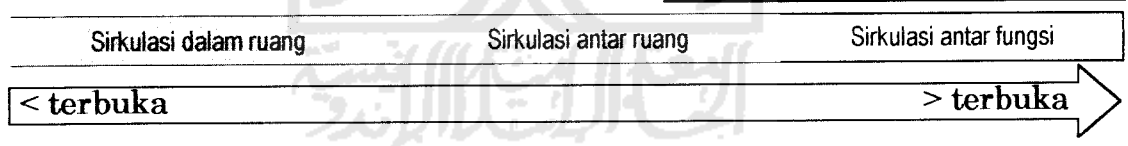
dapat diciptakan melalui lay out ruang yang menggunakan bahan-bahan penutup transparan atau dengan memperbanyak bukaan sehingga merespon interaksi antara pengguna didalam bangunan dan luar bangunan.



2. Hirarki

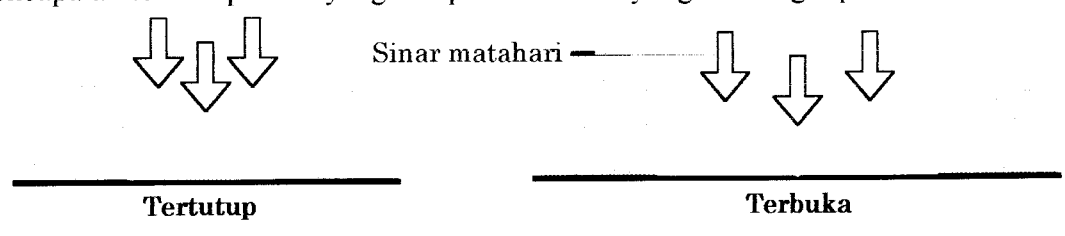
Hirarki diciptakan melalui sirkulasi dengan paduan tingkat keterbukaan pada sirkulasi-sirkulasi yang menuju ruang-ruang utama atau ruang-ruang publik.

Hirarki keterbukaan pada sirkulasi :



3. Skala

Skala dibentuk dengan tata masa dimana skala-skala pada gubahan masa memiliki proporsi jarak yang dapat memberi kesan terbuka yaitu proporsi antara jarak pencapaian terhadap masa yang dicapai atau masa yang meliungkupi.



Skala proporsi keterbukaan pada jarak masa dapat ditentukan dengan orientasi sinar matahari yang masuk diantara jarak masa tersebut.

3.3.2 Analisa kesan Kewibawaan

Tabel 3.11 Dasar Penentu Kesan Wibawa

Faktor penentu	Tata masa	Lay out ruang	Bentuk bangunan	Sirkulasi
Komposisi				
Hirarki				
Skaia				

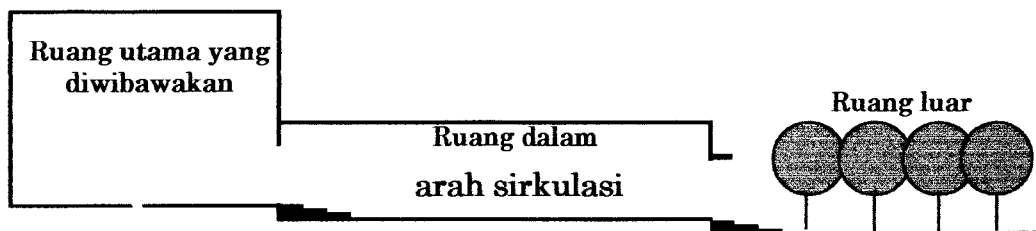
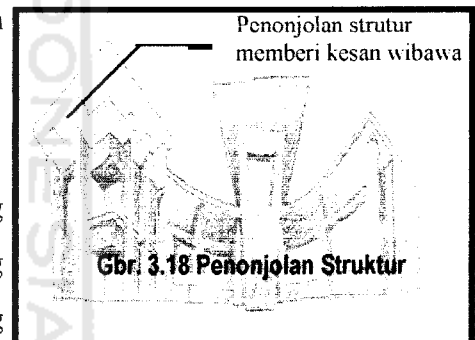
Keterangan :

: berhubungan
 : tidak berhubungan

Dalam menentukan kesan kewibawaan pada bangunan Gedung DPRD Kulon Progo dapat dicapai melalui :

1. Komposisi

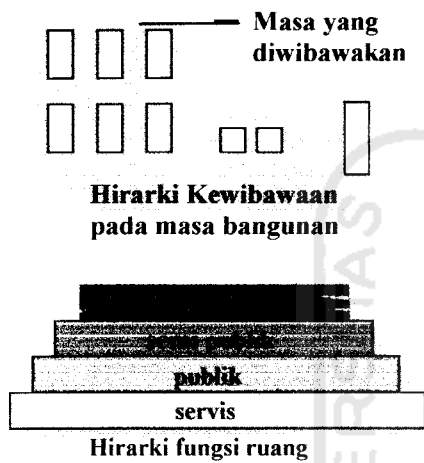
Yaitu penerapan komposisi pada lay out ruang dimana kewibawaan diterapkan pada ruang-ruang utama dengan peninggian lantai seperti pada ruang pimpinan, ruang sidang, ruang sidang paripurna, sedangkan pada bentuk bangunan kewibawaan diterapkan pada fasade utama, entrance dan ruang pengamatan selain itu kewibawaan diciptakan melalui penonjolan ornamen atau dengan bahan-bahan yang memberi kesan elegan dan penonjolan pada elemen struktur dengan bentuk bangunan yang menggunakan proporsi lebih pada besaran ruang sehingga bangunan terlihat besar dan wibawa serta perpaduan struktur yang memberi makna kuat dan kokoh.



Kewibawaan pada lay out ruang diciptakan dengan peninggian lantai dan proporsi besaran ruang yaitu 5 : 3 untuk lebar-tinggi

2. Hirarki

Hirarki diciptakan melalui tata masa yang memberi arah memusat pada fungsi utama, hal ini akan menghadirkan kesan mewibawakan masa yang dipusatkan atau diintikan. Selain itu juga dapat diciptakan melalui lay out ruang dan sirkulasi yang dihadirkan dengan mempertinggi lantai pada fungsi utama ruang dan memberikan ketinggian atau besaran pada sirkulasi-sirkulasi utama.



Masa dengan hirarki kewibawaan tertinggi diterapkan pada masa bangunan untuk anggota dewan Legislatif, sedangkan sirkulasi dengan hirarki tertinggi diterapkan pada sirkulasi utama yang menghubungkan antar fungsi ruang, lay out ruang dengan hirarki tertinggi diterapkan pada ruang sidang risalah.

3. Skala

Skala diciptakan melalui tata masa dan bentuk bangunan yang sesuai dengan lebar dan tinggi bangunan dengan proporsi yang dapat membentuk kesan wibawa.



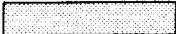

Skala jarak antar masa disesuaikan dengan jarak pandang dari masa lainnya sehingga kewibawaan dari masa yang terlihat menghasilkan objek bangunan yang terlihat secara utuh dari bangunan didepannya.

3.3.3 Analisa Kontektual Bangunan pada Arsitektur Tradisional

Tabel 3.12 Dasar Penentu pada Kontektual Bangunan Tradisional

Faktor penentu	Tata masa	Lay out ruang	Bentuk bangunan	Sirkulasi
Simbolisasi				
Pemaknaan				

Keterangan :

-  : berhubungan
-  : tidak berhubungan

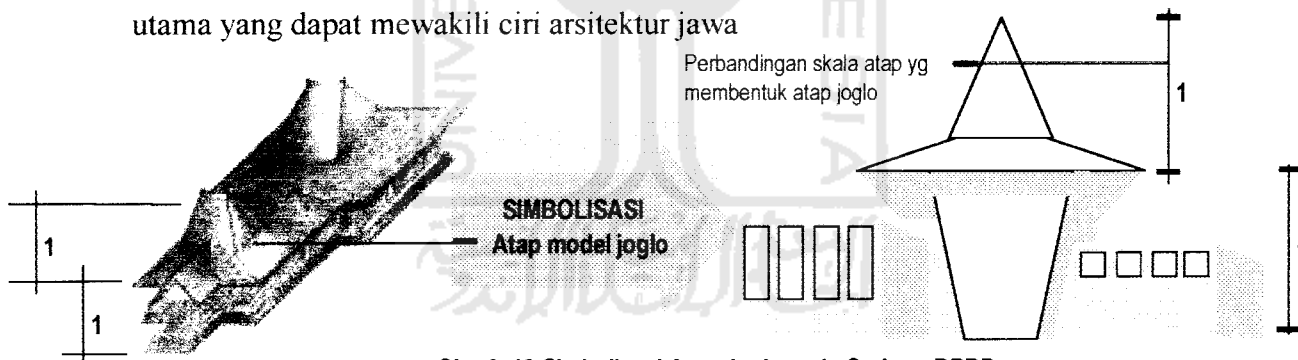
Dalam menentukan kontekstual bangunan Gedung DPRD Kulon Progo pada arsitektur tradisional dapat dicapai melalui :

1. Simbolisasi

Penerapan simbolisasi bertujuan untuk memberikan imej bangunan yang kontekstual terhadap arsitektur tradisional pada publik diluar bangunan sehingga identitas lokasi bangunan dapat terbaca oleh publik

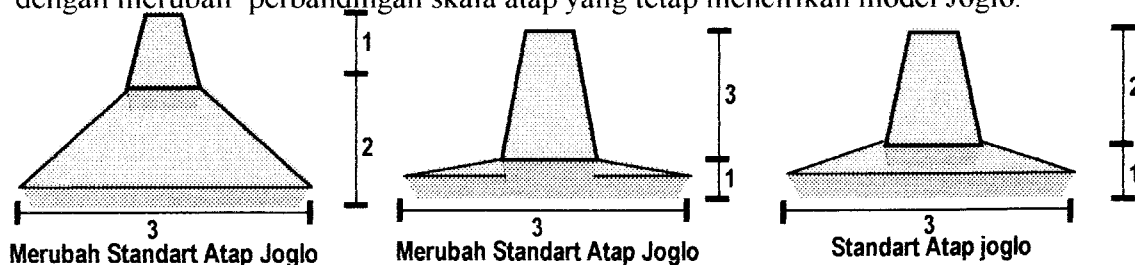
Simbolisasi bangunan diterapkan dengan metode Preseden pada bentuk bangunan misalnya menerapkan model atap joglo pada bangunan Gedung DPRD Kulon Progo sebagai ciri utama bangunan tradisional Jawa khususnya daerah Kulon Progo.

pada lay out ruang penerapan dilakukan dengan meletakkan ornamen-ornamen khas arsitektur jawa pada ruang dalam dan luar bangunan, serta menyimbolkan ciri khas utama yang dapat mewakili ciri arsitektur jawa



Gbr. 3. 19 Simbolisasi Atap Joglo pada Gedung DPRD

Simbolisasi bentuk bangunan tradisional dilakukan dengan menerapkan atap model Joglo pada masa bangunan, untuk memperlihatkan atap Joglo sebagai objek utama maka perletakkannya diterapkan pada masa pengontras agar menjadi objek pandang dengan merubah perbandingan skala atap yang tetap mencirikan model Joglo.

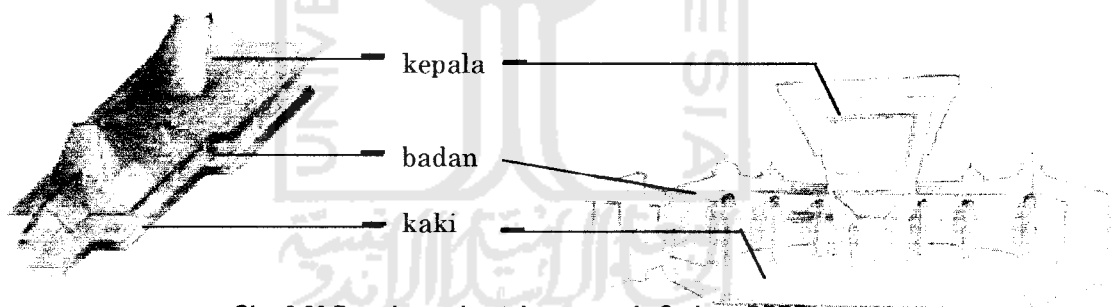


Simbolisasi ornamen-ornamen khas arsitektur Jawa diterapkan pada ruang-ruang utama yaitu pada ruang Sidang Paripurna, ruang Sidang Risalah, dan Lobby.

2. Pemaknaan

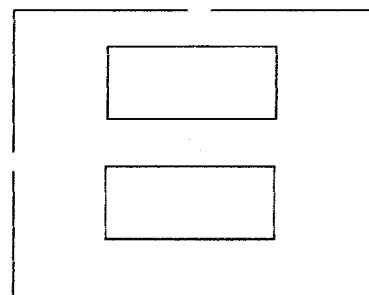
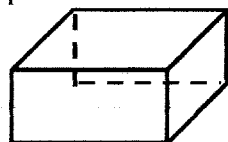
Pemaknaan diterapkan dengan analogi yang kontekstual arsitektur tradisional pada pengguna didalam bangunan sehingga identitas bangunan tetap dirasakan dalam bangunan oleh pengguna atau publik.

Pemaknaan diterapkan pada tata masa, sirkulasi dan lay out ruang yaitu menerapkan makna keseimbangan hidup seperti tubuh manusia sebagai proses organik yang ditransformasikan dalam masa-masa bangunan, hal ini juga tercermin dalam pemaknaan arsitektur Jawa antara lain bangunan terdiri dari kepala, badan dan kaki serta keseimbangan simetris pada masa bangunan yang diciptakan dengan meletakkan masa bangunan pada sumbu pemotong sebagai sumbu simetris yang diterapkan dalam bentuk sirkulasi utama serta penerapan pencapaian secara langsung seperti pada tata sirkulasi arsitektur Jawa.



Gbr. 3.20 Pemaknaan bentuk masa pada Gedung DPRD

Untuk mempertegas makna pada bentuk masa maka dalam penerapan makna kepala dipertegas dengan penggunaan atap Joglo, pada penerapan badan diterapkan pada lingkup masa bangunan sedangkan penerapan kaki dipertegas dengan mempertinggi lantai dari dasar permukaan site.

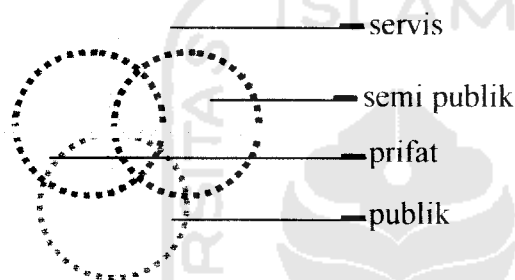


Gbr. 3.21 Sirkulasi sebagai Garis Keseimbangan Masa

Untuk mempertegas garis keseimbangan maka garis tersebut diterapkan kedalam sirkulasi utama yang membagi masa menjadi dua masa simetris atau berupa pencerminan dua masa dengan sirkulasi sebagai garis pencerminan.

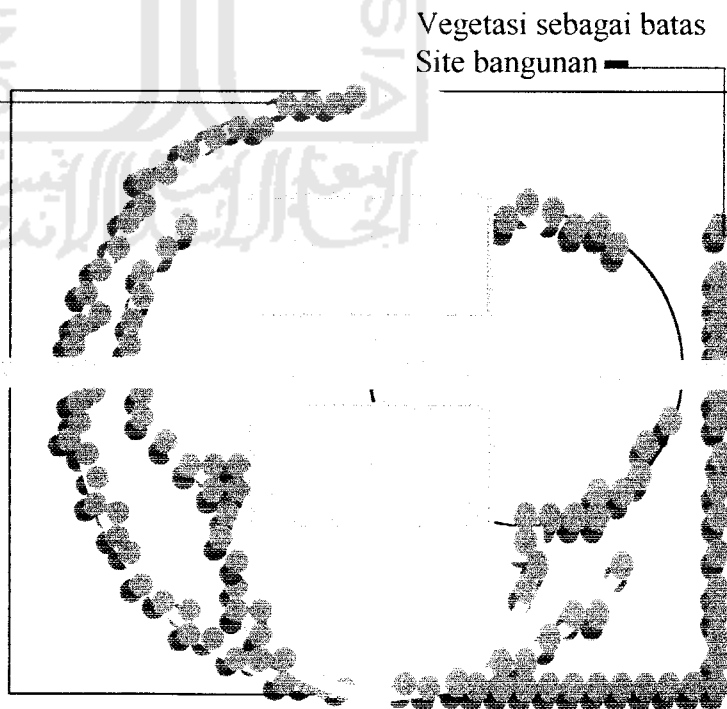
Pada lay out ruang pemaknaan diterapkan pada ruang-ruang yang mewadahi fungsi publik dari transformasi ruang pendopo ke ruang sidang paripurna dan hall, ruang inti senthong tengah ke ruang sidang risalah dan pringgitan sebagai ruang pertemuan khusus ditransformasikan dalam ruang penyampaian pendapat.

Penerapan makna lainnya pada ruang luar adalah dengan menerapkan batas ruang site dengan menggunakan unsur alam seperti vegetasi sebagai batas ruang fungsi dan site.



Vegetasi dan sirkulasi sebagai batas area fungsi ruang

Sirkulasi dicapai secara langsung seperti pada bangunan Joglo yang menempatkan pintu regol tepat didepan bangunan yang sejajar dengan sumbu simetris bangunan yang ditekankan pada kesejajaran ruang pencapaian dengan kuncung bangunan sebagai



Gbr. 3.22 Vegetasi sebagai Batas Area

C. ANALISIS DASAR PERANCANGAN

3.4 Analisa Dasar Perancangan Bangunan

Tabel 3.13 Pendekatan Dasar Perancangan dengan Penampilan Bangunan

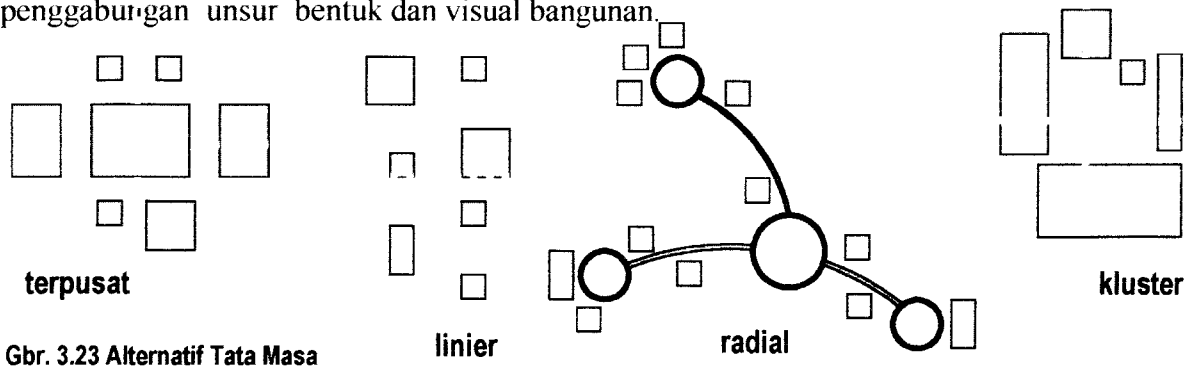
Dasar perancangan / Penampilan bangunan	Tata masa	Tata ruang	sirkulasi	Orientasi
Bentuk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fasade	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Material	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Visual	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Struktur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tekstur dan warna	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Keterangan :

- : berhubungan
- : tidak berhubungan

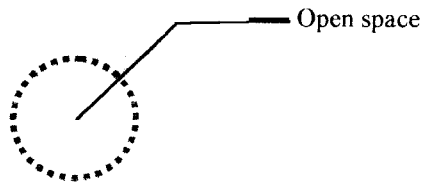
3.4.1 Tata Masa

Tata masa pada Gedung DPRD Kulon Progo adalah gubahan masa yang diterapkan dengan memadukan masa-masa bangunan yang lebih dari satu sehingga membentuk kelompok masa dalam satu bangunan kompleks yang mengarah pada aktifitas gerak pengguna. Susunan masa tersebut diterapkan secara simetris untuk memberi makna pada kontekstual bangunan tradisional, pendekatan-pendekatan tersebut dilakukan dengan penggabungan unsur bentuk dan visual bangunan.



Gbr. 3.23 Alternatif Tata Masa

Dari alternatif tata masa diatas maka susunan secara kluster merupakan model terbaik untuk bangunan yang memiliki luas site terbatas. Dalam pengembangannya susunan cluster diikat dengan open space sebagai ruang gerak antar masa sehingga komposisi masa akan tetap menjadi satu kelompok bangunan.



Perletakan Open space ditentukan oleh titik temu garis keseimbangan sehingga selain berfungsi sebagai ruang gerak open space juga berfungsi sebagai stabiliser kelompok

masa.

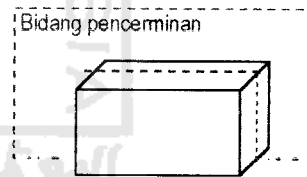
1. Bentuk

Yaitu penerapan bentuk masa yang sesuai dengan karakter keterbukaan dan kewibawaan serta kontekstual pada arsitektur tradisional setempat. Bentuk-bentuk beraturan akan memberikan kesan wibawa karena sifat kestabilan dan kekokohnya sedangkan bentuk-bentuk yang fleksibel/ tidak beraturan dan bentuk yang berkarakter terbuka akan memberikan kesan terbuka karena merespon pada pergerakan, serta simbolisasi ciri khas arsitektur tradisional setempat sebagai identitas wilayah.

Bentuk dasar :



Masa persegi memiliki stabilitas bentuk



Garis keseimbangan



Masa cekung memiliki kesan menerima

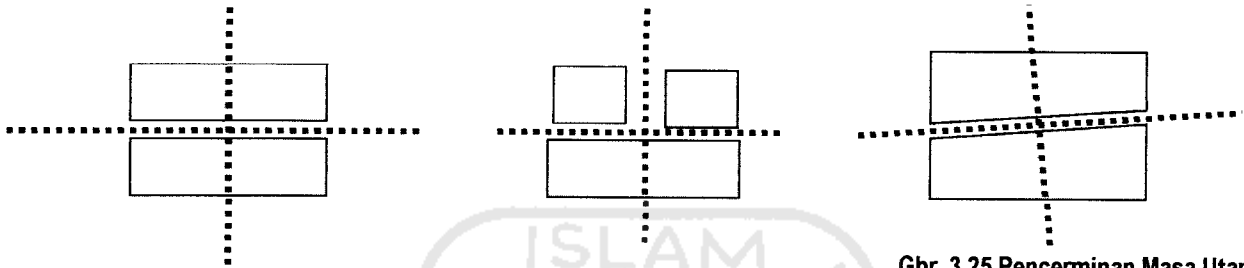


Garis keseimbangan

Gbr. 3.24 Bentuk Dasar Masa

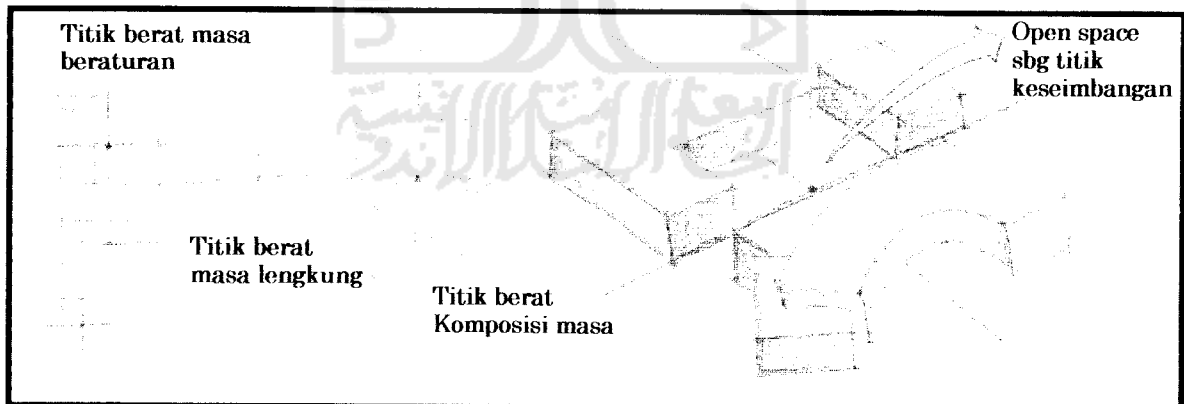
2. Visual

Pencerminan dari masa yang sejajar dengan garis keseimbangan akan memberikan visual pada masa, karena stabilitas masa sebagai bagian dari kesan kewibawaan maka hasil pencerminan juga harus masa-masa yang stabil yang terikat oleh titik dan garis keseimbangan.



Gbr. 3.25 Pencerminan Masa Utama

Dari alternatif diatas maka bentuk pencerminan masa ketiga atau penggabungannya akan memberikan nilai lebih pada visual masa karena susunan dari masa-masa tersebut memberi bentuk yang tidak kaku dan tidak monoton. Pada pengembangan susunan Omasa tersebut dapat dilakukan dengan meletakkan open space dengan bentuk lingkaran atau persegi sebagai dasar dalam pengurangan bentuk pada masa-masa yang diikat.



Gbr. 3.26 Open Space sebagai Dasar Penyesuaian Bentuk Masa

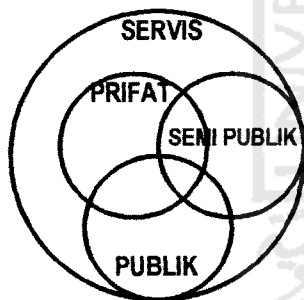
3.4.2 Tata Ruang

Tata ruang pada Gedung DPRD Kulon Progo adalah susunan ruang-ruang dalam dan luar yang dapat mencerminkan kesan terbuka, wibawa dan kontekstual pada arsitektur tradisional setempat. Pada penerapannya dilakukan dengan pendekatan pada unsur penampilan bangunan seperti bentuk, fasade, material, struktur dan tekstur.

1. Bentuk dan Material

Dalam merencanakan ruang luar, site pada bangunan dikelompokkan dalam beberapa zoning untuk memudahkan perletakan ruang-ruang yang akan direncanakan. Pada penzoningan Gedung DPRD Kulon Progo diterapkan bentuk lingkaran sebagai lingkup area fungsi ruang, penerapan bentuk lingkaran dimaksudkan untuk menghindari kesan peruangan yang monoton serta kaku pada ruang luar karena site bangunan memiliki bentuk persegi.

Untuk mempertegas ruang-ruang fungsi tersebut maka digunakan material alam berupa vegetasi yang berfungsi sebagai batas area.



Ruang Publik diletakkan didepan pintu masuk pencapaian karena untuk memudahkan aktifitas yang bersifat publik seperti demonstrasi dan sidang paripurna

Ruang Semi publik diletakkan disebelah barat karena untuk mendapatkan view dari luar sebagai bentuk identitas area.

Ruang Prifat diletakkan dibelakang ruang publik dan semi publik dimaksudkan untuk mendapatkan kenyamanan ruang sebagai wadah aktifitas kerja. kerja.

Ruang servis diletakkan melingkupi semua ruang karena ruang tersebut merupakan wadah bagi pelayanan kegiatan.

2. Fasade, Struktur, Tekstur dan Warna

Dalam merencanakan ruang dalam, pada permukaan masa bangunan serta interiornya didukung dengan penampilan fasade bangunan yang mengekspose struktur rangka sebagai pendukung kesan wibawa, sedangkan tekstur dan warna diterapkan dalam mendukung dan mempertegas susunan struktur.

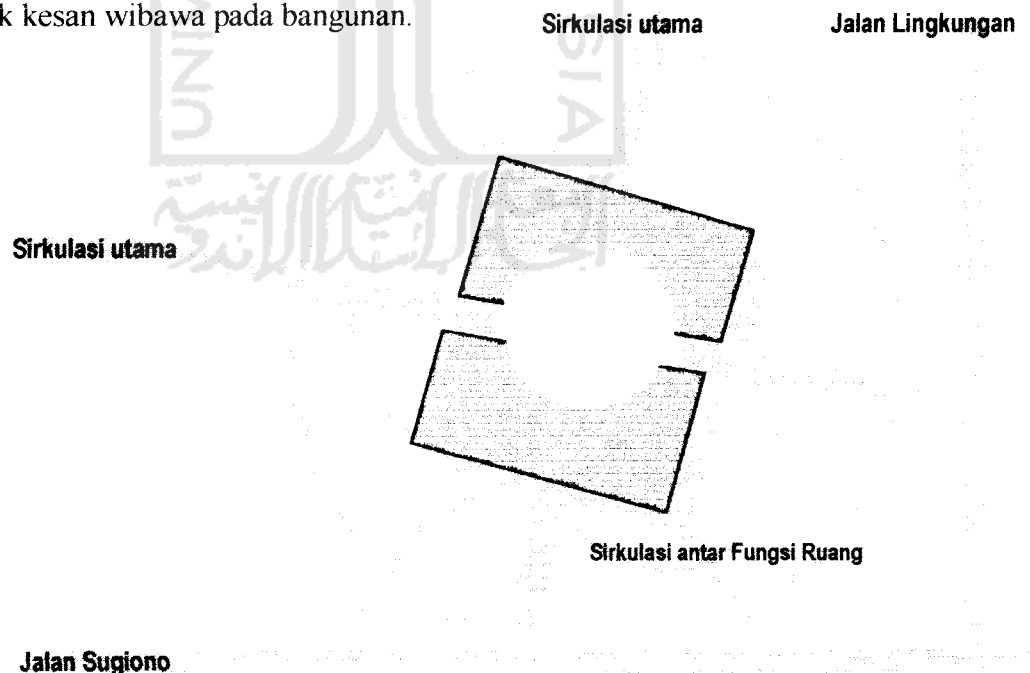
3.4.3 Sirkulasi Bangunan

Sirkulasi pada Gedung DPRD Kulon Progo merupakan wadah aktifitas gerak yang mengikat ruang satu dengan ruang lainnya. Untuk mendapatkan kesan terbuka dan wibawa pada sirkulasi ditentukan oleh unsur bentuk dan material.

1. Bentuk

Bentuk sirkulasi yang linier dan jelas/ tegas akan memberikan kesan terbuka karena mengarah pada kemudahan dalam pencapaian dan tidak memberi kesan yang tersamar.

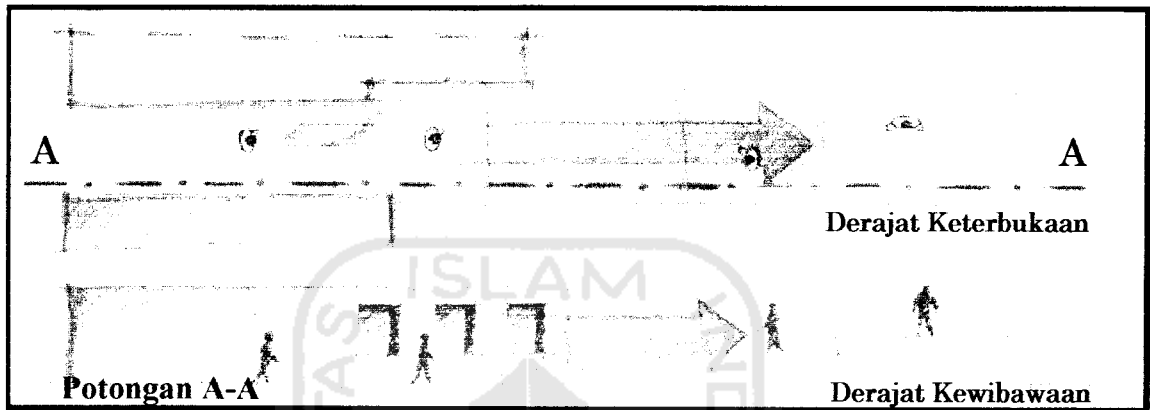
Bentuk yang mempertinggi lantai sirkulasi dengan ruang-ruang yang besar akan memunculkan kesan wibawa pada sirkulasi tersebut, hal ini sesuai dengan unsur-unsur pembentuk kesan wibawa pada bangunan.



Gbr. 3.27 Kelompok Sirkulasi

2. Material

Material pada penutup/ lingkup alur sirkulasi yang tidak padat akan memberikan kesan terbuka karena menciptakan respon interaksi pada pengguna didalamnya dengan pengguna lain diluar ruang sirkulasi.



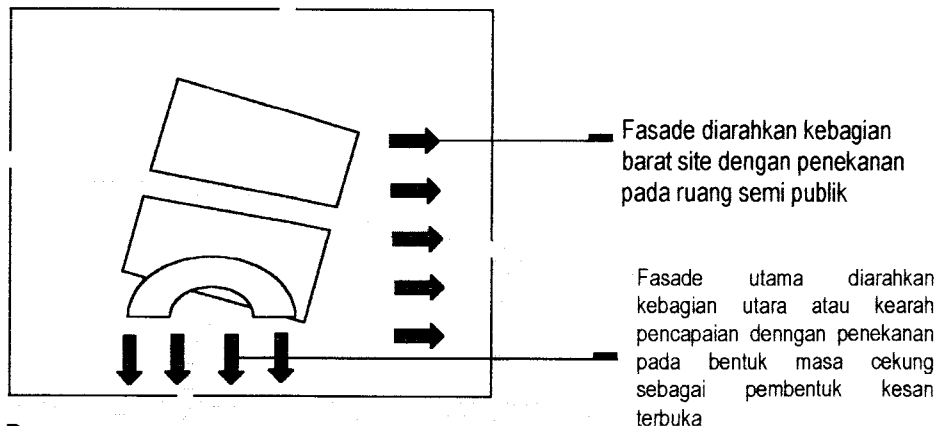
Gbr 3.28 Derajat Sirkulasi

3.4.4 Orientasi Bangunan

Orientasi atau arah hadap bangunan terhadap angin, sinar matahari dan view pada Gedung DPRD Kulon Progo dalam membentuk kesan terbuka dan wibawa ditentukan oleh unsur bentuk dan fasade bangunan, yaitu :

1. Bentuk

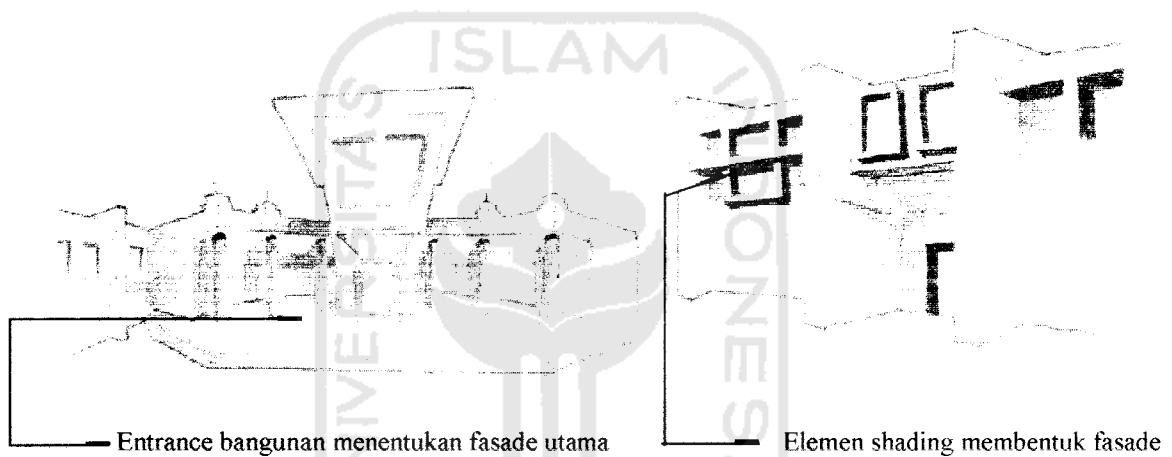
Bentuk masa cekung diarahkan kearah utara atau pada arah pencapaian masuk karena bentuk cekung merupakan unkanpan visual bangunan dalam memberi kesan mengundang dan terbuka, sedangkan arah orientasi fasade yang lain diarahkan ke bagian barat.



Gbr. 3.29 Arah Fasade Bangunan

2. Fasade

Bentuk-bentuk yang merespon arah orientasi seperti masa cekung atau bukaan-bukaan yang mengarahkan arus angin dan elemen-elemen penghalang sinar matahari secara langsung akan membentuk fasade yang diatur dengan mempertegas bentuk bukaan pada elemen luar bangunan yang akan membantu ungkapan kesan terbuka pada bangunan. Perpaduan ornamen pada bidang yang ditekankan akan memberikan kesan Wibawa karena menghadirkan susunan-susunan elemen yang elegan dan indah.



Gbr. 3.30 Orientasi Fasade Bangunan

3.5 Analisa Pendekatan Bangunan

3.5.1 Pendekatan Struktur

Dalam merencanakan sistem struktur yang digunakan harus mempunyai kekuatan penyangga beban juga harus bisa mendukung proses kegiatan yang berlangsung didalamnya. Oleh sebab itu struktur yang dipakai adalah struktur rangka dengan konstruksi beton bertulang, hal ini disesuaikan dengan keadaan beban bangunan yang harus diterima dan fungsi peruangannya sebagai bangunan perkantoran.

Pada dasarnya rencana bangunan Gedung DPRD Kulon Progo bukan merupakan bangunan lantai banyak hal ini sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota Wates dengan batas tinggi

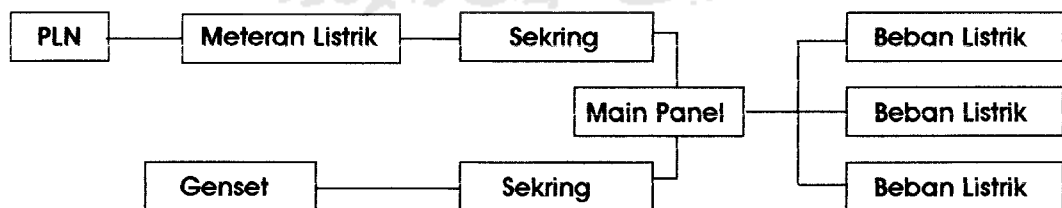
bangunan adalah 12 meter atau dua lantai, rencana peruangan Gedung DPRD membutuhkan kelompok ruang yang padat sebagai respon kebutuhan akan fungsi bangunan sebagai bangunan perkantoran yang membutuhkan banyak ruang dengan hubungan ruang yang erat, disamping itu ditinjau dari kebutuhan besaran ruang pada bangunan ini juga tidak membutuhkan ruang bentang lebar. Maka dengan struktur rangka selain baik dalam merespon beban dan gaya juga akan menghasilkan ruang-ruang dari susunan kolom dan balok yang posisinya lebih fleksibel karena harus dapat diterapkan dengan pola-pola tertentu sesuai dengan kebutuhan ruang atas fungsi.

3.5.2 Pendekatan Sistem Utilitas

Sistem utilitas yang akan dibahas adalah mengenai sistem jaringan listrik, sistem penghawaan, sistem komunikasi, sistem pemadam kebakaran dan sistem air bersih dan air kotor.

1. Sistem Jaringan Listrik

Secara umum sistem jaringan listrik memiliki dua sumber utama yaitu PLN dan sumber listrik dari Genset. Jaringan listrik pada Gedung DPRD Kulon Progo ini menggunakan dua sumber listrik dengan sumber utama diambil dari PLN dan sumber cadangan diambil dari Genset.



Gbr. 3.31 Bagan Pendistribusian Listrik

Pertimbangan diatas disesuaikan dengan fungsi listrik pada bangunan perkantoran yang penggunaannya dominan pada siang hari. Pemilihan PLN sebagai sumber utama dilakukan atas dasar kemudahan dalam memperoleh sumber dan mudah dalam

perawatan, genset sendiri difungsikan untuk mengantisipasi adanya gangguan pada sumber PLN pada waktu berjalannya kegiatan yang memerlukan listrik penuh sebagai prasarana pendukung, misalnya pada saat sidang paripurna.

2. Sistem Penghawaan

Sistem penghawaan yang akan diterapkan dalam bangunan Gedung DPRD kulon Progo adalah :

a. Penghawaan Alami

Pada bangunan Gedung DPRD Kulon Progo penghawaan alami menjadi system penghawaan utama, hal ini diterapkan karena pada bangunan tersebut merupakan bangunan berlantai rendah dan menggunakan susunan ruang-ruang yang lebar dan tinggi sehingga udara alami yang masuk akan lebih stabil dalam ketinggian bangunan yang rendah dan dengan ruang-ruang yang besar sirkulasi udara akan lebih optimal, disamping itu bukaan-bukaan yang dioptimalkan akan sangat membantu proses sirkulasi dari luar kedalam bangunan.

Dasar dari pertimbangan penghawaan alami adalah :

- Menghindari udara langsung
- Aliran udara silang.

Dari dasar pertimbangan diatas maka penghawaan alami dicapai dengan pengaturan dimensi dan posisi bukaan yang sekaligus dapat dimanfaatkan untuk pencahayaan alami, selain itu juga penempatan tanaman sebagai penyaring dan pengarah udara.

b. Penghawaan Buatan

Penghawaan buatan diterapkan pada ruang-ruang publik yang membutuhkan suplai udara tambahan serta pengaturan kelembaban dan suhu pada ruang-ruang tertentu karena kepadatan penggunanya. Hal ini diterapkan dalam tujuan mendapatkan kenyamanan pada pemakai di dalam ruang, seperti pada ruang sidang.

3. Sistem Komunikasi

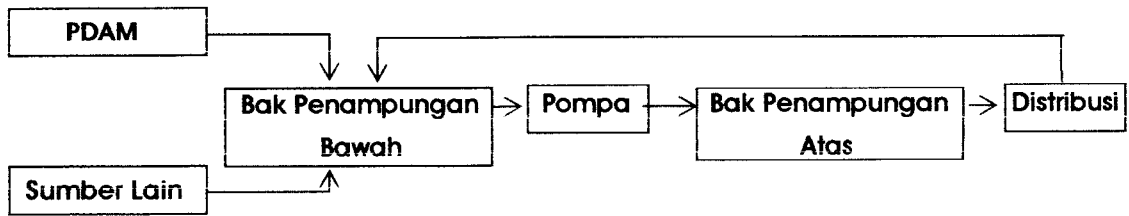
Penggunaan system komunikasi untuk kebutuhan keluar secara otomatis menggunakan system PABX (*Private Automatic Branch Exchange*), dimana system ini pada bangunan Gedung DPRD Kulon Progo ditempatkan pada ruang lobby dan informasi, ruang pengelola dan ruang petugas penerima tamu. Pada ruang Sidang Paripurna dan Hall dipasang speaker (pengeras suara) sebagai kepentingan informasi jarak jauh dengan sistim komunikasi diatur oleh operator pada ruang teknis, sedangkan pada ruang sidang lainnya sistim informasi diatur secara manual.

4. Sistem Pemadam Kebakaran

Sistem jaringan alat pemadam kebakaran menggunakan sistim manual dengan alat pemadam berupa tabung gas halon atau gas CO₂. hal ini diterapkan karena bangunan Gedung DPRD Kulon Progo bukan merupakan Bangunan Tinggi dengan jangkauan dekat, sehingga tidak perlu diterapkan alat-alat pemadam otomatis seperti hydrant, springkler atau hoserack selain itu juga akan menekan biaya pemasangan dan perawatan. Penyediaan jaringan alat-alat pemadam kebakaran ditempatkan pada tempat-tempat yang mudah terlihat dan mudah dijangkau dalam keadaan darurat yaitu pada ruang-ruang publik dan ruang-ruang yang memiliki prasarana/ kelengkapan alat kantor yang mudah terbakar, seperti pada ruang-ruang sidang, ruang perpustakaan dan dokumentasi, ruang arsip, ruang teknis dan ruang parkir dalam.

5. Sistem Jaringan Air Bersih

Penyediaan air bersih dicapai melalui dua sumber yaitu sumber yang berasal dari PDAM dan sumber yang berasal dari Air Pompa, dari kedua sumber tersebut ditampung pada bak penampungan air dan kemudian didistribusikan melalui tabung tower air kedaerah pendistribusian seperti Ivatori, cafeteria, KM/WC, mushola dan ruang-ruang lain yang membutuhkan.



Gbr 3. 32 Bagan Distribusi Air Bersih

6. Sistem Jaringan Air Kotor

Sistem jaringan air kotor merupakan penampungan air-air buangan atau limbah dari lavatori dan KM/WC berupa air kotor dan limbah padat, mushola berupa air kotor, dapur dan kafetaria berupa air dan limbah lemak ditampung pada bak kontrol yang kemudian diteruskan ke septiktang dan disalurkan ke sistem drainasi kota yang terlebih dahulu diproses melalui treatment, dan apabila letak pipa drainase kota lebih tinggi dari treatment maka pembuangan dilakukan dengan bantuan pompa yang bekerja secara otomatis.

